



Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia

Khairul Rahman¹

¹Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution No. 113
Pekanbaru 28284, Indonesia

Corresponding Author: khairul.ip@soc.uir.ac.id

Article Info

Keyword:
Keyword 1;
Policy
Implementation
Keyword 2;
Social Restrictions
Keyword 3;
Covid-19

Abstract: *Almost all countries in the world face serious problems related to Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Countries affected by COVID-19 have implemented various policies to deal with COVID-19 and its impacts. Indonesia is the country with the largest population (268.7 million) in Southeast Asia experiencing the COVID-19 problem. The Indonesian government in responding to COVID 19 has issued a strategic policy to overcome the spread of COVID-19, namely Large-Scale Social Restrictions (PSBB). PSBB is carried out in the form of changes to outdoor activities carried out by everyone who is domiciled and / or engaged in activities. However, the fact that the policy has not been effective. Many elements or elements do not comply with the PSBB policies that have been implemented by the respective regional governments in Indonesia, which will create new problems in the dynamics of the government being carried out. This study uses qualitative methods with the main objective of descriptive and revealing. The results of the fact research show that several indicators influence policy implementation which are: realization of the problem; Policy; implementation of policies; relations between organizations; and the policy environment.*

Kata Kunci:
Kata kunci 1;
Implementasi
Kebijakan
Kata kunci 2;
PSBB
Kata kunci 3;
Covid-19

Abstrak: Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan serius terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang terdampak COVID-19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak (268,7 juta) di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan COVID-19. Pemerintah Indonesia dalam merespon COVID 19 telah mengeluarkan kebijakan strategis mengatasi penyebaran COVID-19, yakni Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Namun fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, bahkan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap. Hasil penelitian mendapati ada beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni: karakteristik dari masalah; karakteristik kebijakan; pelaksanaan kebijakan; hubungan antar organisasi; dan lingkungan kebijakan.

Article History: Received 14-Februari-2021, Revised 9-Maret-2021, Accepted: 17-April-2021

PENDAHULUAN

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Meningkatnya kasus terpapar dan jumlah kematian yang diakibatkan COVID-19 menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan cepat dan tepat yang diharapkan mampu memutus penyebaran COVID-19. Dikonfirmasi di Indonesia pada saat penelitian ini berlangsung ada 287.008 Positif, 214.947 sembuh, dan 10.740 Meninggal Dunia diakibatkan COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 2020).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk 268,7 juta yang dengannya pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat atas kebijakan yang akan dikeluarkan. Tidak dipungkiri terjadi perdebatan antara elit di Indonesia dan terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID-19. Pilihan kebijakan *lockdown* sempat terjadi pro dan kontra karena akan berdampak pula pada aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah (Lating et al. 2021).

Pemerintah Indonesia mencermati berbagai hal dengan memperhitungkan aspek ekonomi, politik, sosial, kemananan dan pertahanan dalam penanganan COVID-19. Sebagai bentuk responsifitas atas kondisi yang ada Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Indonesia merespon dan berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota.

Indonesia lebih memilih kebijakan PSBB dibandingkan *lockdown* yang sempat diperhitungkan dan diperdebatkan. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat melakukan PSBB dengan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dari data yang diperoleh ada beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang disetujui melaksanakan kebijakan PSBB. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) di Indonesia yang disetujui menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19

Provinsi	Kabupaten/Kota
(1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat, (3) Banten, (4) Jawa Timur, (5) Jawa Tengah, (6) Provinsi Gorontalo, (7) Provinsi Riau, (8) Provinsi Sumatra Barat	(1) Kota Bekasi, (2) Kabupaten Bekasi, (3) Kota Depok, (4) Kota Bogor, (5) Kabupaten Bogor, (6) Kota Tangerang, (7) Kabupaten Tangerang, (8) Kota Tangerang Selatan, (9) Kota Pekanbaru, (10) Kota Makassar, (11) Kota Bandung, (12) Kabupaten Bandung, (13) Kabupaten Bandung Barat, (14) Kota Cimahi, (15) Kabupaten Sumedang, (16) Kota Tegal, (17) Kota Banjarmasin, (18) Kota Tarakan, (19) Kota Surabaya, (20) Kabupaten Sidoarjo, (21) Kabupaten Gresik, (22) Kabupaten Sukabumi, (23) Kabupaten Kampar, (24) Kabupaten Pelalawan, (25) Kabupaten Siak, (26)

Kabupaten Bengkalis, (27) Kota Dumai, (28) Kota Palembang, (29) Kabupaten Gowa, (30) Kota Prabumulih, (31) Kabupaten Buol, dan (32) Kabupaten Barito Kuala.

Sumber: diolah dari berbagai sumber di Media Massa

Berdasarkan data, ada 8 Provisni dan 32 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menerapkan kebijakan PSBB. DKI Jakarta adalah Provinsi pertama yang menerapkan PSBB di Indonesia sejak tanggal 10 April 2020 sampai 14 hari ke depan. Kemudian durasi PSBB dapat diperpanjang oleh masing-masing daerah jika masih terdapat bukti penyebaran COVID-19. Jumlah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSBB bisa bertambah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Besekala Besar dalm Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, juga Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Penanganan COVID-19. Daerah yang telah ditetapkan tersebut menjadi perhatian penelitian dalam melihat implemenetasi kebijakan PSBB dengan mengambil data dari berbagai sumber.

PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Kebijakan PSBB yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang terdampak COVID-19 pada umumnya memuat beberapa hal, meliputi: (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; (2) Aktivitas bekerja di tempat kerja; (3) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah; (4) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum; (5) Kegiatan sosial dan budaya; (6) Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu melaksanakan kebijakan PSBB secara konsisten sesuai dengan agenda kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yang meminta penerapan PSBB benar-benar diterapkan secara ketat dan efektif (Firmansyah n.d.). Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Ketentuan-ketentuan dalam aturan PSBB secara umum belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Didapati masih ada ditemukan aktivitas berkerja (kantor, pasar, pabrik, rumah makan), masih ada kegiatan keagamaan ditempat ibadah, masih banyaknya aktivitas masyarakat diluar rumah, kegiatan ditempat umum yang belum menerapkan *physical distancing*, masih banyak masyarakat yang beraktivitas tidak menggunakan masker, dan masih banyaknya pergerakan orang yang menggunakan transportasi serta tidak mengikuti aturan PSBB.

Berdasarkan fakta yang ada implementasi kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia belum berjalan secara optimal. Jumlah kasus dan dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia terus mengalami penambahan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap efektifitas penanggulangan COVID-19. Ada banyak studi yang berbicara implementasi kebijakan, namun untuk studi yang peneliti lakukan memiliki kebaruan dari sebelumnya dimana masalah yang terjadi memiliki karekteristik yang kompleks yang dihadapkan dengan asepek ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan pertahanan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PSBB

Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melakukan sesuatu (Dye 1981). Pada saat ini pengertian kebijakan yang disampaikan Dye merupakan definisi yang tepat menggambarkan kebijakan berkaitan dengan masalah COVID-19. Kondisi yang dihadapi di setiap negara yang terdampak COVID-19 diamna pemerintah yang

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu merupakan suatu pilihan keijakan. Walaupun sebenarnya kebijakan itu merupakan sesuatu yang dierncanakan secara tepat dan cermat. Sementara tidak melakukan sesuatu merupakan suatu kondisi yang lebih menunjuk pada ketidaksiapan atau ketidakberpihakan. Oleh karena itu, sejalan dengan Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Anderson 1979).

Negara sebagai oragnisasi yang memiliki tujuan dalam mensejahterakan masyarakat yang harus direalisasikan, juga dihadapkan pada berbagai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya saat ini perosalan berkaitan dengan COVID-19 yang menuntut pemerintah diseluruh dunia untuk mengambil kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki maksud untuk menyeleasiaskan berbagai permasalahan yang ada dimasyarakat dan menciptakan kertiban yang memungkinkan setiap orang dapat menjalankan kehidupannya secara wajar dan mencapai kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19. Kebijakan PSBB secara spesifik tersebut bertujuan untuk:

1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19
3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19
4. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran COVID- 19

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bukanlah akhir dari terselesaikannya permasalahan publik, artinya kebijakan yang ditetapkan bukanlah jaminan kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya. Implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik.

Secara etimologi implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil. Imlementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan setelah kebijakan diterapkan atau disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan (Tachjan 2008). Dalam implementasi kebijakan akan terjadi sejumlah faktor yang berinteraksi satu dengan yang lain dan faktor dimaksud terdiri dari isi kebijakan, lingkungan politik, kelompok sasaran dan lingkungan(Ali 2012)

Chatfield, Akemi Takeoka; AlAnazi, Jazem (Chatfield and AlAnazi 2015) memaparkan dalam penelitiannya bahwa dalam implementasi kebijakan pentingnya mengintegrasikan sumber daya dan proses informasi pemerintah dan pada akhirnya menyediakan interoperasi system informasi e-government yang independet. Makoza, Frank (Makoza 2016) dalam temuannya menegaskan bahwa level implementasi kebijakan e-government berada pada tahap awal kehadiran dan interaksi. Selain itu hasil penelitian menunjukkan lambatnya pertumbuhan implementasi e-government karena terbatasnya integrasi layanan publik. Studi ini memberikan wawasan yang mungkin berguna dalam meningkatkan implementasi e-government. Dinamika kebijakan PSBB di Indonesia menarik untuk didalami, dinamika terkait dengan perubahan dan perkembangan kebijakan (Rahman and Mariana 2017). Jadi ada Beberapa studi pernah dibuat berkaitan dengan implementasi kebijakan, diantaranya studi yang membahas pengaruh politisi, manajer, dan disposisi birokrat dalam implementasi kebijakan (May and Winter 2009) Selain itu keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga ditentukan oleh komitmen pelaksana kebijakan dan pemanfaatan kemajuan teknologi (Wulandari and Munawaroh 2020)

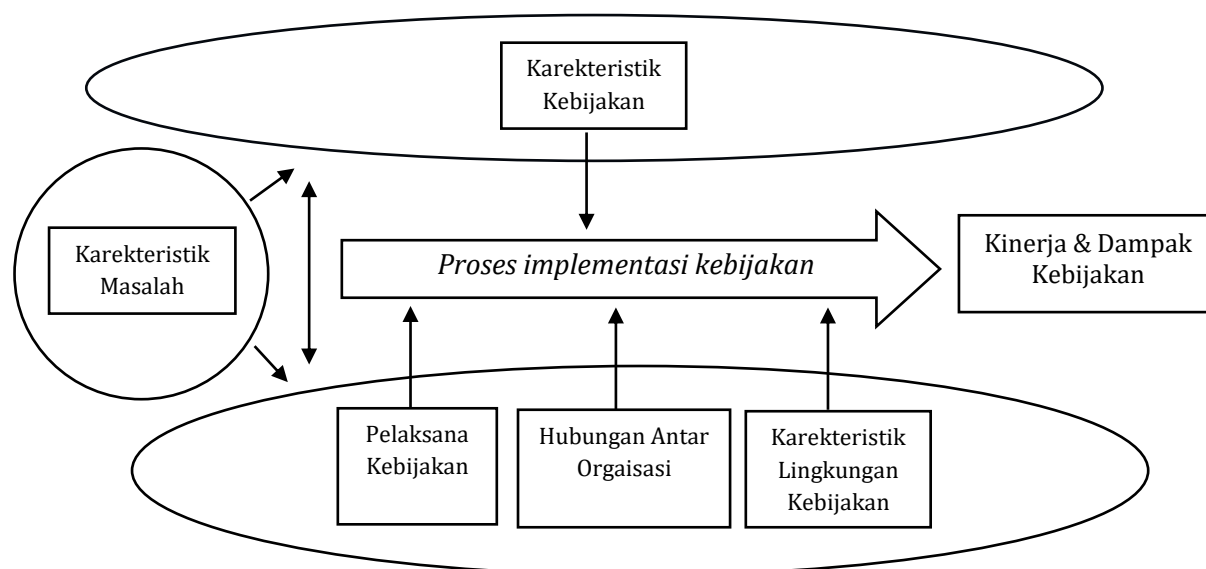
Dari berbagai referensi ada beberapa faktor yang mempengaruhi implemmentasi kebijakan. Menurut Merilee S Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel

yakni *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi). Variabel *content of policy* meliputi: (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauhman perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; (4) apakah letak suatu program sudah tepat; (5) apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci; dan (6) apakah suatu program didukung oleh sumberdaya yang memadai (Grindle 1980).

Selanjutnya dalam padangan Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel yakni: (1) communication, (2) resources, (3) dispositions, dan (4) bureaucratic strukture. Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap implementasi (Edwards III 1980). Menurut Van Meter dan Van Horn kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut meliputi: (1) standar dan sarana kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi atar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (4) karekteristik organisasi pelaksana; (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi; dan (6) disposisi implementator (Van Meter and Van Horn 1975).

Secara umum ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: (1) tractability of the problems; (2) ability of statute to structure implementation; (3) nonstatutory variables affecting implementation (Mazmanian, dan Sbastier 1983). Berdasarkan pendekatan dari beberapa sumber terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengidentifikasi sesuai dengan permasalahan dan fenomena menetapkan beberapa variabel yang mempengaruhi imlementasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Indonesia diantaranya dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1. Indikator-Indikator Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)



Masing-masing variabel tersebut terjadi interaksi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Variabel implementasi kebijakan meliputi karekteristi dari masalah, karekteristik kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hubungan antar organisasi dan lingkungan kebijakan merupakan satu kesatuan utuh yang mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah.

1. Karakteristik dari masalah

- Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan
 - Kejelasan isi kebijakan
 - Keberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis (kajian mendalam)
 - Sejauh mana keterlibatan dan kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam kebijakan,
 - Dukungan keuangan atas kebijakan tersebut
 3. Pelaksanaan Kebijakan
 - Sumber daya yang melaksanakan kebijakan
 - Komunikasi yang dilakukan
 - Disposisi implementator (respon, pemahaman, komitmen, kejujuran, dan sifat musyawarah)
 - Memiliki Petunjuk Teknis
 - Strategi yang digunakan
 4. Hubungan antar Organisasi
 - Seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi/badan pelaksana
 - Seberapa luas kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
 - Sejauh mana koordinasi dan kerjasama dijalankan
 5. Lingkungan Kebijakan
 - Kondisi sosial, politik, ekonomi dan geografis
 - Tingkat kemajuan teknologi
 - Dukungan publik
 - Tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat sasaran

Secara spesifik meminjam pendapat Mazmanan dan Sbatier peneliti mengungkap dalam studi ini terdapat beberapa variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah, terumatama dalam implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19. Selain karekteristik masalah, karekteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan (Sabatier and Mazmanian 1980), juga dipengaruhi oleh variabel pelaksana kebijakan dan hubungan antar organisasi yang melaksanakan kebijakan. Selain itu dalam studi ini peneliti melakukan pengembangan atas makna yang terkandung dalam masing-masing indikator atas dasar temuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap (*to describe and explore*). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif yaitu menggambarkan implementasi kebijakan pembatasan sosial bersekala besar dalam penanganan COVID-19. Kemudian penelitian ini akan menungkapkan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembatasan sosial bersekala besar dalam penanganan COVID-19. Penelelitian dilakukan di beberapa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disetujui menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam penanganan COVID-19. Dimana jumlah daerah yang menerapkan PSBB dalam penanganan COVID 19 bisa bertambah sesuai denang kondisi dan kriteria pemberlakuan. Adapaun jumlah yang ada dalam tulisan ini menjadi fokus peneliti untuk mandalami permasalahan implmenentasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19.

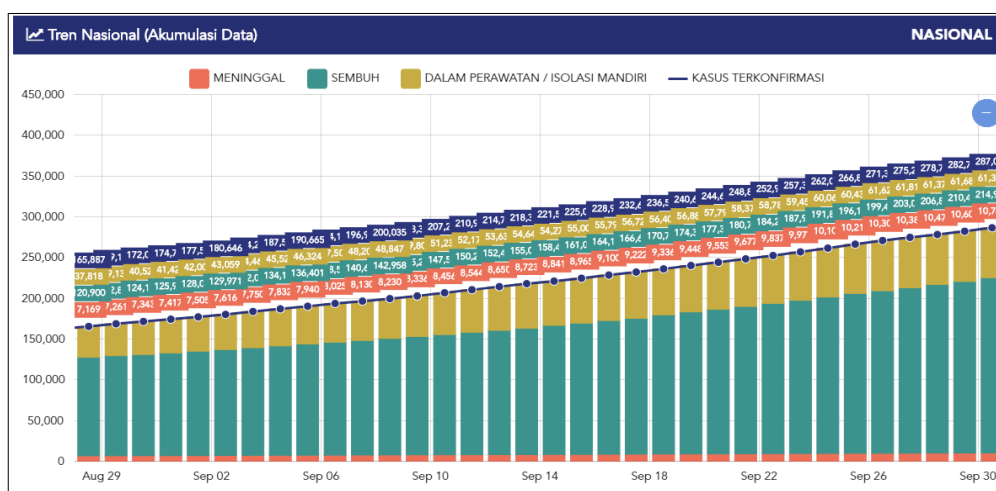
Adapaun informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh penting yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan COVID-19 dan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, dokumen, wawancara, dan materi

audio-visual. Pada masa COVID-19 berlangsung pengumpulan data tidak bisa dilakukan secara bebas kelapangan, namun dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, peneliti mengamati berbagai media dan melakukan observasi pada setiap pemerintahan daerah yang menerapkan PSBB. Selanjutnya dalam melakukan analisis data kualitatif peneliti menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu: (1) reduksi data (2) Penyajian data; Dan (3) penarikan kesimpulan /verifikasi (Miles 1992).

TEMUAN DAN HASIL

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap beberapa daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Indonesia yang telah mengimplementasikan kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19, didapati tidak berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat COVID-19 terus bertambah dan menyebar secara signifikan sejak kasus pasien pertama terinfeksi virus corona diumumkan pada 2 Maret 2020.

Gambar 2. Tren Nasional Kasus Covid-19



Sumber: Diambil pada Tanggal 1 Oktober 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020)

Berdasarkan gambar diatas, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan dan hal ini tentunya memperpanjang dampak sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Kemudian di beberapa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menetapkan PSBB sebelumnya memperpanjang kebijakan yang telah ditetapkan seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Gorontalo, Kota Pekanbaru, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, Kota Surabaya, Kota Palembang, Kota Tangerang, dan disusul oleh beberapa daerah lain yang telah menerapkan kebijakan PSBB. Hal tersebut menunjukkan belum berjalannya secara efektif kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya mempertimbangkan responsifitas atas situasi yang terjadi namun juga harus mempertimbangkan efektifitas, sinergisitas, dan koordinasi penanganan COVID-19.

Situasi yang dihadapi memang tidak mudah, Kebijakan dan Implementasi perubahan kebijakan membutuhkan suatu kondisi yang tidak mudah, karena berhadapan dengan kepentingan, pergeseran struktur, aturan Lembaga pelaksana dan pola interaksi baru (Crosby 1996). Studi ini mendapati terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan yakni karekteristi dari masalah, karekteristik kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hubungan antar organisasi dan lingkungan kebijakan.

Karekteristik dari Masalah

Peneliti mengidentifikasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 menimbulkan dampak sosial yang relatif sulit ditangani seperti kemiskinan dan pengangguran. Dikarenakan kebijakan PSBB membatasi pergerakan orang untuk beraktifitas di tempat kerja dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ini merupakan kebijakan yang sangat memberatkan bagi pemerintah dan banyak pihak, terutama bagi masyarakat yang berkerja di sector informal dan masyarakat dalam kategori lemah dari segi ekonomi. Bagi masyarakat miskin, kemiskinan sama halnya mematikan seperti COVID-19 atau lebih parah lagi dari COVID-19. Masalah yang begitu kompleks berkaitan dengan ekonomi masyarakat membuat implementasi kebijakan PSBB tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Kelompok sasaran dari kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 adalah kelompok masyarakat dengan identitas agama, etnis, ras dan budaya yang beragam. Kelompok sasaran yang heterogen cenderung memiliki sifat, karakter dan pandangan yang berbeda-beda dalam melihat kebijakan. Kemajemukan kelompok sasaran diidentifikasi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Menjadi kendala dalam implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 juga berkaitan dengan sasaran kebijakan yang mencakup seluruh populasi yang ada di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan PSBB. Pengendalian dan pengawasan kebijakan membutuhkan banyak sumber daya yang mampu terlaksanakannya maksud dan tujuan kebijakan.

Perubahan perilaku yang diharapkan dari kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 tidak semudah yang diperkirakan karena berkaitan dengan mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam beraktifitas. Harapan perubahan perilaku bagi setiap orang berupa: (1) Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), (2) Menggunakan masker di luar rumah, (4) melaksanakan *physical distancing* dan *Social distancing*, (5) Melakukan pembatasan aktivitas luar rumah. Perubahan yang dimaksud sulit dilakukan seperti melaksanakan *physical distancing*, karena diluar kebiasaan yang sudah terbudaya dalam masyarakat Indonesia. Selain itu perubahan perilaku yang diharapkan mempengaruhi terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Kemudian kondisi euforia mayoritas masyarakat muslim di Indonesia yang akan menyambut idul fitri dan budaya mudik membuat kebijakan dilihat perubahan perilaku sulit untuk diwujudkan.

Karekteristik Kebijakan

Karekteristik kebijakan bisa diartikan juga sebagai isi kebijakan (Grindle 1980). Namun karektristik kebijakan memiliki makna yang lebih luas yang tidak hanya menyingung isi kebijakan. Selain dari karekteristik masalah keberhasilan kebijakan ditentukan oleh variabel karekteristik kebijakan yang dilihat dari kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis (kajian mendalam), sejauh mana keterlibatan dan kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam kebijakan, dan dukungan keuangan atas kebijakan tersebut.

Telaah terhadap kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 secara isi telah memenuhi aspek kejelasan baik dari maksud, tujuan dan ruang lingkup dari kebijakan. Ruang lingkup isi kebijakan telah menggambarkan: 1) Pelaksanaan PSBB; 2) Hak, kewajiban serta

jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB; 3) pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan sumber daya penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*; 4) Pembinaan dan Pengawasan; 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; 6) pendanaan; 7) sanksi. Sehingga memungkinkan kebijakan akan mudah diimplementasikan karena pelaksana kebijakan atau implementator mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Namun kinerja dan dampak kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan juga dipengaruhi variabel lain.

Dilihat dari dukungan teoritis, kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 belum memiliki dasar teoritis yang kuat sehingga belum teruji dalam keberhasilannya. Hal ini dikarenakan kebijakan muncul dengan tuntutan yang begitu mendesak atau respon cepat atas kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ditengah semakin merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia. Meminjam pendapat Weimer dan Vining diperlukan logika dari suatu kebijakan, dimaksudkan agar kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis (Weimer, David L dan Vining 1999). Keberlakuan suatu kebijakan tidak bisa dilepaskan dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Kemudian harus dipertimbangkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan.

Kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 dilihat dari isi kebijakan telah memperhatikan kepentingan kelompok sasaran. Hal ini dapat dibuktikan dari lingkup kebijakan yang mengatur jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. namun hal tersebut perlu diwujudkan dengan kemampuan keuangan yang memadai.

Kebijakan yang telah ditetapkan implementasinya membutuhkan dukungan keuangan yang cukup, terutama berkaitan dengan kebijakan yang mengatur jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Berdasarkan penelitian, keterbatasan dana menjadi faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Keterbatasan keuangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat kebijakan menimbulkan permasalahan lain yang menuntut pemerintah menyiapkan data yang benar-benar valid terkait masyarakat ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan. Kemampuan keuangan menjadi faktor penghambat dikarenakan pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi dimana sumber-sumber penerimaan pemerintah mengalami penurunan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak berjalan normal.

Pelaksana Kebijakan

Kegiatan berikutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang meliputi sumber daya yang melaksanakan kebijakan, komunikasi yang dilakukan, Disposisi implementator, memiliki *standar operating procedures*, dan strategi yang digunakan.

Isi kebijakan yang telah ditetapkan pada tahap implementasi membutuhkan sumber daya pelaksana kebijakan. Penelitian mendapati kelompok sasaran yang mencakup seluruh populasi dalam suatu wilayah membutuhkan sumber daya pelaksana yang cukup. Ketidacukupan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan membuat kebijakan PSBB berjalan kurang optimal, implementasi kebijakan PSBB hanya berlaku diruang-ruang atau tempat tertentu saja dan tidak memberikan dampak yang berarti. Kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 harus didukung dengan control dan sanksi yang tegas. Keberlangsungan control dan pemberian sanksi membutuhkan sumberdaya yang memadai. Pemerintah masih terkesan setengah hati melibatkan unsur-unsur yang ada seperti Kepolisian, TNI dan organisasi masyarakat dalam jumlah banyak untuk menjalankan kebijakan PSBB.

Tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat (kelompok sasaran) akan menyebabkan kesenjangan kebijakan. Fakta yang didapati selama penelitian, dimana banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan dalam PSBB diidentifikasi dikarenakan belum efektifnya komunikasi yang dilakukan. Masyarakat belum memahami kebijakan PSBB yang dilakukan, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya resistensi yang dilakukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan adanya disposisi implementator (respon, pemahaman, komitmen, kejujuran, dan sifat musyawarah). Komitmen dan keseriusan pemerintah pusat untuk menjalankan protokol kesehatan dalam implementasi kebijakan PSBB dipertanyakan oleh banyak pihak. Kebijakan pemerintah yang mendua membuat implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 berjalan kurang efektif, misalnya pemerintah masih ragu melakukan kebijakan larangan mudik, adanya pembukaan transportasi, ada banyak mal atau pusat perbelanjaan yang buka, bahkan tanpa ada protocol kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disposisi implmentator dalam implementasi kebijakan PSBB di beberapa daerah secara tidak langsung sudah dipahami oleh petugas dan adanya respon yang cepat. Namun, standar oprasional prosedur atau lebih lanjut petunjuk teknis yang tidak jelas di awal-awal membuat pelaksanaan kebijakan menjadi tidak jelas.

Penarapan PSBB pada kenyataannya belum didukung oleh petunjuk teknis atau lebih jauh Standar oprasional prosedur yang menjamin terlaksananya kebijakan. Petunjuk teknis menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak. Petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam implementasi PSBB meliputi petunjuk teknis penerima bantuan terdampak kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pemberlakuan sanksi, pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan strategi yang tepat, apalagi berhadapan dengan karakteristik masalah COVID-19. Masih banyaknya aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat diluar rumah dan tidak mematuhi aturan membutuhkan strategi yang arif yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Strategi control dan penerapan sanksi yang tegas belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Kemudian pelaksanaan kebijakan tidak harus menggunakan kekerasan semata untuk menertibkan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu minimnya strategi yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan membuat kebijakan tidak berjalan secara optimal.

Hubungan antar Organisasi

Pemeirntah dalam implementasi kebijakan terlibat dalam hubungan formal dan informal. Tidak bisa dipungkiri implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 sangat diperlukan keterlibatan dan dukungan antar instansi pemerintah dan dengan instansi lain yang diluar pemerintah. Berdasarkan penelitian keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana dalam implementasi kebijakan PSBB belum tercipta secara padu. Pemeirntah pusat dan pemerintah daerah sering terjadi perbedaan pendapat dan ego sectoral yang begitu kuat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSBB menunjukkan banyak perbedaan pendapat dan saling menyudutkan, misalnya terkait dengan aturan transportasi dan bantuan bagi warga terdampak kebijakan. Sementara itu kondisi yang ada dalam implementasi PSBB membutuhkan dukungan dan kesepahaman antar instansi baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kemudian kelmompok-kelompok luar atau organisasi luar pemerintah belum terlibat secara signifikan dalam implementasi kebijakan PSBB. Pemerintah pusat dan Pemeirntah daerah tidak melibatkan secara aktif perguruan tinggi, swasta, organisasi masyarakat, Lembaga kemasyarakatan (rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang

taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat) dan Lembaga adat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat dan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan PSBB yang telah dilaksanakan. Banyak Lembaga kemasyarakatan terutama Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang mengeluhkan atas sikap pemerintah yang jalan sendiri dan tidak melibatkan mereka dalam implementasi kebijakan PSBB.

lemahnya dukungan antar berbagai institusi/badan pelaksana dan keterlibatan kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan membuat lemahnya koordinasi dan kerjasama yang dijalankan. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak luar pemerintah yang belum optimal menjadi penyebab PSBB belum berjalan sesuai maksud dan tujuan kebijakan.

Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan merupakan tempat dimana kebijakan tersebut diadakan. Lingkungan kebijakan merupakan segala sesuatu yang berada dan berpengaruh terhadap perumusan suatu kebijakan. Oleh karena itu keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sejauh mana lingkungan kebijakan mampu menerima kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19. Lingkungan kebijakan ditentukan oleh: 1) kondisi sosial, politik, ekonomi dan geografis; 2) Tingkat kemajuan teknologi; 3) Dukungan publik, dan 4) Tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat sasaran.

Dihadapkan pada kondisi sosial, ekonomi dan geografis belum mendukung terhadap kebijakan PSBB. Kebijakan PSBB itu sendiri membuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu, seperti kemiskinan, pengangguran, dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga masyarakat sulit untuk menerima kebijakan PSBB yang telah ditetapkan. Identifikasi yang peneliti lakukan mendapati PSBB belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan sosial yang efektif. Lingkungan kebijakan membutuhkan kebijakan sosial yang ditetapkan pemerintah untuk merespon masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan PSBB namun implementasi dari Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB belum berjalan dengan optimal. Data yang tidak lengkap dan koordinasi yang belum sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyebabkan beberapa kebijakan sosial tidak berjalan secara efektif. Demikian juga dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang luas dan dipisah oleh perairan membuat jangkauan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan mudah, membutuhkan koordinasi yang baik antara instansi yang terkait.

Di Era e-Governmen hari ini implementasi perlu memperhatikan aspek proses yang mudah, penyediaan data dan memanfaatkan media sosial dalam penanganan Covid-19. Menurut Wirtz, Bernd W.; Weyerer, Jan C.; Thomas, Marc Julian; Möller, Anke (Wirtz et al. 2017) bahwa kualitas penyediaan layanan dapat ditingkatkan dengan mengurangi waktu proses dan menyediakan data pemerintah yang terbuka. Lebih lanjut Menurut Rahmanto, Andre N.; Dirgatama, Chairul Huda Atma (Rahmanto and Dirgatama 2018) bahwa kehadiran media sosial yang menekankan pada pertukaran konten yang bersifat partisipatif dan kolaboratif menjadi penting, khususnya di era demokrasi. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan yang memfasilitasi warganya dalam pelayanan publik.

Kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 salah satunya bertujuan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang. Oleh karena itu tingkat kemajuan teknologi sangat dibutuhkan pada saat pandemic. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh pemanfaatan kemajuan teknologi (Wulandari and Munawaroh 2020). Berdasarkan penelitian

sebagia besar daerah-daerah di Indonesia telah didukung oleh kemajuan teknologi sehingga masyarakat bisa mengakses informasi kebijakan lewat internet dan teknologi digital. Namun masih ada desa-desa yang ada di tingkat daerah yang belum didukung oleh kemajuan teknologi sehingga sangat terbatas untuk mendapatkan informasi terkait dengan penanganan COVID-19. Kemajuan teknologi suatu negara sangat menentukan implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19. Masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk tidak beraktifitas diluar rumah bahkan bagi mayoritas umat Islam di Indonesia yang sedang melaksanakan Idul Fitri bisa memanfaatkan teknologi untuk menjalin komunikasi dengan keluarga atau saudara tanpa harus mengunjungi secara langsung. Berdasarkan penelitian juga mendapati pemerintah belum memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan pengawasan warga masyarakat dalam beraktifitas, misalnya dengan tracking (pelacakan) melalui *handphone* agar pelaksana kebijakan tidak kecolongan dalam menerapkan PSBB.

Kebijakan PSBB yang telah ditetapkan di masing-masing daerah di Indonesia pada dasarnya mendapatkan dukungan kebijakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kekhawatiran sebagai besar masyarakat terhadap dampak COVID-19. Namun dukungan publik tersebut tidak sepenuhnya diberikan, dikarenakan masyarakat dihadapkan pada faktor ekonomi. Seperti yang telah disampaikan diawal bahwa Kemiskinan sama halnya mematikan seperti COVID-19 atau lebih parah lagi dari COVID-19. Terjadi kondisi yang berbanding terbalik dimana, penyebaran COVID-19 tinggi sedangkan kesadaran masyarakat rendah. Kebijakan PSBB secara ruang lingkup sudah ada jaminan insentif berupa ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB namun hal tersebut belum berjalan dengan optimal dikarenakan data yang tidak valid dan birokrasi yang Panjang. Jadi dukungan masyarakat terhadap kebijakan tidak berbanding lurus dengan terpenuhinya kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat terhadap kebijakan PSBB belum sesuai harapan, dikarenakan masyarakat di hadapkan oleh faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hanya sebagai kecil yang memiliki kepatuhan dan responsivitas. Kondisi pada bulan Ramadhan dan budaya penyambutan Idul Fitra umat Islam di Indonesia juga menjadi faktor sejauh mana kepatuhan dan responsivitas masyarakat pada kebijakan PSBB. Ironi dalam kebijakan PSBB yang dilaksanakan di Indonesia, ketika banyak masyarakat berbondong-bondong ke Mal atau pasar ditengah pandemic COVID-19. Fakta menunjukkan banyaknya pasar yang diserbu warga menunjukkan kepatuhan yang diharapkan dari kebijakan PSBB dihadapkan pada euphoria Radmadhan bagi mayoritas umat Islam di Indonesia. Tingkat kepatuhan masyarakat yang lemah diidentifikasi juga dikarenakan belum tegasnya aparat pelaksana kebijakan dalam menertibkan pelanggaran kebijakan PSBB.

KESIMPULAN

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah yakni terdiri dari: karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hubungan antar organisasi dan lingkungan kebijakan. Dari masing-masing variabel berdasarkan penelitian didapati *Pertama*, Karakteristik dari masalah menjadi awal mula faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan covid-19, cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dan dihadapkan dengan masalah sosial dan ekonomi menjadi sulit untuk diimplementasikan. *Kedua*, karakteristik kebijakan belum didukung kajian teoritis yang kuat, dan kemampuan dukungan keuangan serta data yang valid berkaitan jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. implementasi kebijakan PSBB diidentifikasi memiliki ambiguitas yang tinggi. *Ketiga*, pelaksanaan kebijakan belum ada

dukungan sumberdaya pelaksana yang memadai, komunikasi, petunjuk teknis, sehingga memengaruhi respon dan komitmen pelaksana kebijakan. *Keempat*, hubungan antar Organisasi belum didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik baik antara instansi maupun dengan pihak-pihak diluar pemerintah. *Kelima*, lingkungan kebijakan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan geografis, pemanfaatan kemajuan teknologi, dukungan dan kepatuhan serta responsivitas masyarakat. Kemudian berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pembatasan sosial bersekala besar dalam penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* di Indonesia maka dapat dikemukakan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Masukan bagi Penelitian berikutnya bisa diarahkan pada pendekatan atau perspektif kolaboratif pentahelix dalam implementasi kebijakan PSBB
2. Jaringan kerja formal dan informal pemerintah perlu diperkuat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan, terutama dalam sosialisasi dan komunikasi kebijakan PSBB
3. Diperlukan pendekatan keagamaan, budaya, dan kearifan lokal dalam implementasi kebijakan PSBB
4. Pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelanggaran kebijakan PSBB perlu diberlakukan
5. Pemerintah perlu menciptakan atau membangun sistem dengan integrasi data yang valid terkait dengan data kependudukan dan Kesehatan
6. Diperlukan komitmen, responsifitas, dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan PSBB
7. Menetapkan petunjuk teknis atau lebih jauh Standar operasional prosedur yang menjamin terlaksananya kebijakan
8. Adanya sinergisitas dan harmonisasi antar tingkat pemerintah (pusat/daerah/desa)
9. Implementasi kebijakan PSBB membutuhkan kebijakan sosial lainnya yang memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat lemah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Bandung: Refika Aditama.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Chatfield, Akemi Takeoka, and Jazem AlAnazi. 2015. “Collaborative Governance Matters to E-Government Interoperability.” *International Journal of Public Administration in the Digital Age* 2(3): 24–44.
- Crosby, Benjamin L. 1996. “Policy Implementation: The Organizational Challenge.” *World Development* 24(9 SPEC. ISS.): 1403–15.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Washington: Congressional Quarterly Press.
- Firmansyah, Rian. “Jokowi Minta PSBB Di 4 Provinsi Diterapkan Secara Ketat Dan Efektif.” <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13376391/jokowi-minta-psbb-di-4-provinsi-diterapkan-secara-ketat-dan-efektif>.

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: New Jersey: Princeton University Press.
- "Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19." 2020. <https://covid19.go.id/>.
- Lating, Ali et al. 2021. "I Ndonesian G Overnance J Ournal (Kajian Politik – Pemerintahan) Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability (Kapasitas Pemerintah) Dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis Di Provinsi Maluku Utara." 04(01): 27–41.
- Makoza, Frank. 2016. "The Level of E-Government Implementation: Case of Malawi." *International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* 11(2): 880–95.
- May, Peter J., and Søren C. Winter. 2009. "Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation." *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Mazmanian, dan Sbastier, Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New Jersey: Scott, Foresman and Company.
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta: Jakarta: UI Pres.
- Rahman, Khairul, and Dede Mariana. 2017. "The Dynamics Policy of the Deputy Head of Region in the Implementation of Local Government." 163(Icodag): 324–29.
- Rahmanto, Andre N., and Chairul Huda Atma Dirgatama. 2018. "The Implementation of E-Government through Social Media Use in Local Government of Solo Raya." *2018 International Conference on Information and Communications Technology, ICOIACT 2018 2018-Janua(83)*: 765–68.
- Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. 1980. "THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS." *Policy Studies Journal*.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Weimer, David L dan Vining, Aidan R. 1999. *Policy Analysis: Concepts and Practice*. third edit. New Jersey: Prentice-Hall.
- Wirtz, Bernd W., Jan C. Weyerer, Marc Julian Thomas, and Anke Möller. 2017. "E-Government Implementation: Theoretical Aspects and Empirical Evidence." *Public Organization Review* 17(1): 101–20.
- Wulandari, Widuri, and Siti Munawaroh. 2020. "The Implementation of Smart City in Creating Innovations of Public Services By Regional Governments (Case Study of Bandung City and Makassar City)." *Jurnal Caraka Prabu* 4(1): 47–68.